

# KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KEDUA MEI 2011

Pada 9 Mei 2011 ini DPR memulai Masa Persidangan IV tahun 2010-2011 setelah melewati Masa Reses III tahun 2010-2011. Konsentrasi kegiatan Dewan tetap pada pelaksanaan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Agenda minggu kedua Masa Sidang IV ini diserahkan kepada Komisi dan Badan-Badan untuk: [1] menyusun program kerja, dan [2] menyusun laporan hasil kunjungan kerja Komisi dalam Masa Reses. Badan Anggaran menyiapkan program pembicaraan pendahuluan RAPBN 2012, dan Badan Legislasi, Komisi dan Pansus memfokuskan pelaksanaan kegiatan perundang-undangan. Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu kedua Mei 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

## Legislasi

Program legislasi diprioritaskan pada penyelesaian 17 RUU yang merupakan luncuran tahun 2010. Sebenarnya ada 21 RUU luncuran tahun 2010, 4 RUU sudah diselesaikan pada masa sidang lalu yaitu: RUU Transfer Dana, RUU Informasi Geospasial, RUU Akuntan Publik, dan RUU Keimigrasian. Dari 17 RUU tersisa, terdiri dari 14 RUU dari DPR dan 3 dari Pemerintah. RUU dari DPR yang harus diselesaikan antara lain RUU tentang Intelijen Negara, RUU tentang perubahan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang perubahan UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, RUU tentang Mata Uang, RUU tentang perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Bantuan Hukum, UU tentang BPJS, dan lain-lain. Sedangkan 3 RUU dari Pemerintah yaitu RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, RUU tentang perubahan UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, dan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga akan segera diselesaikan pada Masa Sidang ini.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang senantiasa dipantau publik, Pimpinan Dewan telah meminta Alat Kelengkapan Dewan yang menanganinya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi ini untuk dapat menghasilkan produk legislasi yang berpihak pada rakyat. Pimpinan mengharapkan agar berbagai substansi krusial dapat jalan



keluar melalui intensitas lobi, baik antar fraksi maupun antara DPR dan Pemerintah.

## Pengawasan

Komisi-Komisi melakukan Rapat-rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan pasangan kerja masing-masing. Temuan-temuan yang dijumpai di daerah, baik pada saat bertemu dengan konstituen maupun pada saat kunjungan lapangan, akan segera ditindaklanjuti pada masa sidang ini. Bahkan, dimungkinkan adanya rapat kerja gabungan komisi.

Tim Pengawas yang telah dibentuk DPR masih akan melanjutkan tugasnya. Tim Khusus Penanganan TKI di Arab Saudi terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepulangan TKI dari Arab Saudi. Komisi IX masih akan memantau rencana penandatanganan perbaikan Nota Kesepahaman mengenai tenaga kerja sektor domestik antara Indonesia dan Malaysia yang direncanakan pertengahan bulan Mei ini. Nota kesepahaman ini kiranya perlu diterapkan juga ke negara-negara tujuan TKI sektor informal lainnya, seperti GCC (Negara-negara Teluk), termasuk Arab Saudi. Komisi VIII sedang mempersiapkan Panja untuk pengawasan berkaitan dengan rancana penyelenggaraan haji tahun 2011.

Kasus kecelakaan Pesawat Merpati di Kaimana Papua Barat, menjadi perhatian Komisi XI dan telah dilakukan RDP

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **FOTOGRAFER:** Eka Hindra **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



*suasana Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun 2010-2011*

dengan jajaran Dirut PT. Merpati.

## Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selain monitoring terhadap pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011 oleh Komisi-Komisi DPR-RI, maka untuk memenuhi Pasal 157 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, Dewan menjadwalkan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012. Pada tanggal 20 Mei 2011 akan dilakukan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN oleh Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012, Kebijakan Umum, dan Prioritas Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Pandangan fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah diagendakan pada Rapat Paripurna berikutnya.

Proses berikutnya, Badan Anggaran membentuk empat Panitia Kerja yaitu [1] Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN tahun 2012, [2] Panitia Kerja RKP tahun 2012, [3] Panitia Kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN tahun 2012, dan [4] Panitia Kerja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN tahun 2012.

Selanjutnya dilakukan rapat-rapat kerja Komisi I sampai dengan XI dengan mitra kerjanya masing-masing, dan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk dilakukan sinkronisasi. Hasil pembicaraan pendahuluan ini akan dijadikan masukan oleh Pemerintah bagi penyusunan RUU APBN tahun 2012 dan nota keuangannya setelah melalui persetujuan Rapat Paripurna DPR.

DPR akan terus memantau perkembangan nilai tukar

rupiah yang diprediksi terus menguat. Walaupun penguatan ini merupakan respon positif bagi APBN kita, namun demikian, BI selaku otoritas moneter diminta terus menjaga nilai rupiah agar tidak menguat terlalu cepat. Karena penguatan terlalu cepat, berpotensi menekan ekspor Indonesia dan berdampak negatif terhadap fundamental ekonomi makro.

## Diplomasi Parlemen

Dalam rangka memenuhi undangan Ketua Parlemen Irak, Ketua DPR beserta delegasi, pada 1 Mei 2011 bertolak ke Irak. Sejumlah agenda pertemuan berhasil digelar sejak awal kedatangan sampai menjelang kepulangan. Delegasi telah melakukan pertemuan dengan berbagai lembaga kenegaraan dan tokoh masyarakat Irak antara lain: Ketua Parlemen Irak, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Urusan Energi, Wakil Presiden, Menteri Perminyakan, Ketua Majelis Tinggi Islam, dan Ketua Koalisi Iراقيyya. Pertemuan-pertemuan tersebut ditujukan dalam rangka menguatkan hubungan kerjasama antara kedua negara dalam berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam bidang politik, telah ditandatangani MoU mengenai komitmen membangun dan memperkuat hubungan bilateral, serta menjalin komunikasi intensif terhadap isu-isu penting internasional. Secara khusus, MoU menekankan perlunya membangun peningkatan kerjasama keparlemenan diantara kedua negara dalam bidang pertukaran pengalaman, peningkatan hubungan antar komite persahabatan, dan pertukaran keahlian dalam mekanisme kerja.

Dalam bidang ekonomi, kunjungan ini dapat dijadikan pintu pembuka untuk terwujudnya kerjasama perdagangan

dan investasi yang saling menguntungkan.

Dalam bidang sosial budaya, kedua parlemen sepakat untuk mendorong pemerintah agar meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program pertukaran pelajar yang sempat terhenti sejak invasi Irak tahun 2003.

Dalam pidato yang disampaikan Ketua DPR-RI dimuka Sidang pleno Parlemen Irak, Ketua DPR menyampaikan bahwa sejatinya hubungan Indonesia-Irak makin meningkat, pasalnya kedua negara memiliki persamaan yaitu sebagai negara berkembang, negara demokrasi yang berbasis multipartai, dan mayoritas penduduknya muslim. Ketua DPR menyampaikan bahwa demokrasi dan Islam bukanlah dua kutub yang berlawanan. Indonesia memiliki space untuk membuktikan bahwa Islam, demokrasi dan modernitas, dapat berjalan harmonis. Ketua DPR mengundang Parlemen Irak untuk hadir dalam Sidang Parlemen OKI (PUIC) di Indonesia tahun 2012.

KTT Ke-18 ASEAN di Jakarta 7-8 Mei 2011 memiliki arti penting, karena ada sesi khusus dialog antara Kepala-Kepala Pemerintahan ASEAN dengan Ketua-Ketua Parlemen Negara-Negara ASEAN (AIPA). Ketua Parlemen Kamboja selaku Presiden AIPA, berpidato di dalam forum ini untuk membangun kerjasama antara ASEAN dan AIPA. Ketua

DPR dan Ketua Parlemen Vietnam menyampaikan supporting statement. DPR-RI mengharapkan ASEAN, yang tahun 2011 diketuai Indonesia, makin solid dalam membangun kerjasama di antara para anggotanya. Eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional yang sudah matang, dan yang sedang membangun komunitas bersama, akan dapat meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan kawasan.

Dalam kaitan dengan diplomasi parlemen, DPR-RI telah menghadiri beberapa pertemuan internasional, di antaranya sidang Inter-Parliamentary Union ke 124 di Panama. Dalam sidang ini Indonesia berhasil menggolkan *emergency item* mengenai *Strengthening Democratic Reform in Emerging Democracies, Including North Africa and The Middle East*. Indonesia menekankan, bahwa usulan *emergency item* tersebut dilakukan dalam upaya mendukung reformasi demokrasi, khususnya bagi negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah.

Dalam kaitan kepemimpinan Indonesia di Kelompok Geopolitik Asia-Pasifik, DPR-RI akan menyelenggarakan *working group* IPU untuk Parlemen Asia-Pasifik pada awal Juli nanti, untuk menyatukan pandangan Parlemen Asia Pasifik untuk mewarnai IPU melalui modernisasi Strategic Plan IPU.\*

# Kunjungan Delegasi DPR RI Ke Irak

## IRAK DUKUNG KERJASAMA DIBIDANG MIGAS

Pemerintah Irak mendukung peningkatan kerjasama dengan pemerintah Indonesia di bidang minyak dan gas (Migas). Hal tersebut mengemuka saat Ketua DPR Marzuki Alie mengadakan pertemuan dengan Menteri Perminyakan Republik Irak HE Abdul Kareen Luaibi, di Baghdad, Rabu, (4/5).



Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan pidato resminya di Gedung Parlemen Irak

“ Berkaitan dengan minyak mentah, pemerintah Irak sangat mendukung dan siap membantu Indonesia apabila ingin kembali mengadakan kerjasama di bidang tersebut,” Jelas Luaibi saat pertemuan dengan delegasi Ketua DPR ke Irak.

Di mengusulkan, Pemerintah Indonesia segera berkunjung ke Irak dalam rangka mengembangkan sektor minyak antar kedua negara secepatnya. “Biasanya kontrak minyak di Irak berlangsung setiap tahun dan kami siap kapan saja membuat kerjasama dengan Indonesia,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Jelas Ketua DPR Marzuki Alie, saat ini Indonesia mengalami krisis di bidang minyak, dan kedepannya kebutuhan

akan minyak di Indonesia akan semakin meningkat. Karena itu, DPR mengharapkan Pemerintah Irak dapat mengalokasikan dan mencadangkan produksi minyaknya untuk Indonesia. “Cadangan minyak Indonesia semakin berkurang dan akan habis dalam puluhan tahun mendatang, karena itu diharapkan Irak dapat mencadangkan serta mengalokasikan minyaknya,” paparnya.

Selain itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan, adanya peningkatan kerjasama ekspor dan impor produksi pupuk khususnya sulfur. “Indonesia mengharapkan produk pupuk khususnya Sulfur dapat diekspor ke Indonesia,” tambahnya. Dia menambahkan, selain pupuk, Indonesia juga membutuhkan produk gas flare, pasalnya Irak memiliki cadangan gas flare yang cukup besar.

Dia mengatakan, kunjungan ke Irak selain mendorong peningkatan kerjasama di sektor minyak, juga bertujuan meningkatkan hubungan parlemen antara Indonesia-Irak yang telah berlangsung selama 40 tahun silam lalu. “Pada kunjungan muhibah ini, Delegasi telah bertemu dengan Perdana Menteri Irak, Wakil Perdana Menteri, Wapres dan Delegasi juga sempat berbicara dengan Ketua DPR Irak. DPR juga bertemu dengan ketua majelis tinggi islam dan berbagai tokoh politik di Irak,” tandasnya.

### **Berpidato Di Gedung Parlemen Irak**

Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan pidato resminya di Gedung Parlemen Irak, yang disaksikan ratusan anggota Parlemen Irak. Dalam pidatonya, Mantan Sekjen Partai Demokrat tersebut menjelaskan proses demokrasi yang terjadi di Indonesia serta harapan dirinya terhadap demokrasi yang berlangsung di Kawasan Timur tengah.

Dalam pidatonya, dia mengatakan, perkembangan demokratisasi yang terjadi akhir-akhir ini di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, antara lain Sudan, Palestina, Tunisia, Mesir, Yaman, Bahrain, Libiya, dan Suriah memberikan gambaran tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di Negara-negara



*Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan pidato resminya di Gedung Parlemen Irak*

Muslim dan akan berujung pada realisasi harapan dari rakyat yang sekaligus menguatkan negara masing-masing.

Menurutnya, Kesadaran ini juga terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 yang dikenal dengan masa Reformasi. Sejak tahun itulah Indonesia diakui sebagai Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus sebagai parlemen negara Muslim terbesar di dunia yang dilahirkan melalui proses yang sangat demokratis. “Indonesia berhasil membuktikan bahwa demokrasi dan Islam bukanlah dua kutub yang saling berlawanan. Indonesia memiliki space untuk membuktikan bahwa Islam, demokrasi dan modernitas dapat sejalan secara harmonis,” paparnya.

Proses demokratisasi, lanjutnya, dapat terwujud dengan dilakukannya perubahan konstitusi, diselenggarakannya pemilihan umum secara langsung dan terbentuknya lembaga baru sebagai penyeimbang yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. “Hal ini membuktikan bahwa Islam dan de-

mokrasi bisa berjalan bersama sesuai dengan kehendak bangsa yang berlatar belakang budaya berbeda-beda. Indonesia telah membuktikan bahwa perbedaan yang ada tidak menghalangi persatuan untuk menciptakan demokrasi,” tambahnya.

Pada pemilihan umum tahun 1999, saat awal proses demokratisasi, Indonesia memiliki 48 partai yang menjadi peserta pemilu. Kemudian, pada pemilihan umum tahun 2004 ada 24 partai yang ikut dalam pemilu. Dan pada pemilihan umum tahun 2009 ada 34 partai. Selain banyaknya Partai yang ikut dalam pemilihan umum, Indonesia yang berpenduduk sekitar 237 juta orang juga terbagi berdasarkan 33 provinsi yang terdiri dari berbagai etnis, suku dan agama.

“Sebagai Negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memandang bahwa keragaman tidak seharusnya menyebabkan perpecahan dan pertikaian. Sebaliknya, keragaman ini sejatinya memberikan pengayaan dalam proses demokratisasi. Cara pandang

inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia, karena perpecahan hanya akan menghilangkan kekuatan,” jelasnya.

Dengan pengalaman tersebut, paparnya, DPR mengharapkan proses demokratisasi di Irak dapat berlangsung secara damai dengan menghindari cara-cara kekerasan yang hanya akan menuju kepada kehancuran. “Dalam demokrasi, hal yang paling utama perlu diperhatikan adalah tujuan dasar demokrasi itu sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan Negara, sehingga rakyat tidak perlu melakukan aksi terorisme sebagai upaya penyampaian aspirasi. Karena agama Islam secara tegas menafikan cara-cara kekerasan tersebut. Islam sendiri sebagai pembawa kedamaian dan rahmat (kasih dan sayang) bagi seluruh umat manusia,” terangnya.

Di parlemen, papar Marzuki, dirinya sempat berpidato di Gedung DPR Republik Irak mengenai Konstitusi dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dihadiri oleh ratusan anggota parlemen Irak. “DPR menginginkan adanya peningkatan di sektor pendidikan, atau pertukaran pelajar dimana kedua negara saling memberikan kesempatan untuk belajar satu sama lain khususnya mengirim pelajar Indonesia ke Irak begitupun sebaliknya.

Dia mengatakan, mayoritas penduduk Islam harus saling mendukung satu sama lain, caranya dengan meningkatkan kerjasama perdagangan Irak-Indonesia yang selama ini semakin menurun. “Kita mengharapkan peningkatan kerjasama perdagangan

yang sempat menurun paska invasi AS ke Irak,” paparnya.

Menjawab hal tersebut, jelas Luabi, Irak telah memproduksi Sulfur dan hibrida dalam jumlah yang besar. Karena itu, pihaknya menyatakan siap untuk bekerjasama dengan Indonesia untuk menandatangani kontrak jangka panjang terkait produksi sulfur dan hibrida tersebut. “Untuk gas kami belum bisa melakukan ekspor karena mengutamakan kebutuhan dalam negeri namun setelah 6-7 tahun kami siap mengekspor gas tersebut dalam jumlah besar,” jelasnya.

Terkait produk gas elpiji, tambahnya, Pemerintah Irak akan segera memproduksi gas elpiji pada tahun depan, dan apabila Indonesia berniat pemerintah Irak akan mendukung penuh peningkatan kerjasama tersebut. “kedepannya akan ada pembahasan yang penting terutama mengenai sektor minyak dan proyeknya, dan Indonesia dapat mengambil peluang besar untuk bekerjasama maupun berinvestasi pada sektor tersebut,” katanya.

### **DPR Tandatangani MOU Dengan Parlemen Irak**

Ketua DPR RI Marzuki Alie menandatangani Mutual Of Understanding (Mou) Atau Nota Kesepahaman Antara Kedua Parlemen Negara Sahabat. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie dan ketua Parlemen Irak Usama Abdul Aziz Nujayfi yang disaksikan

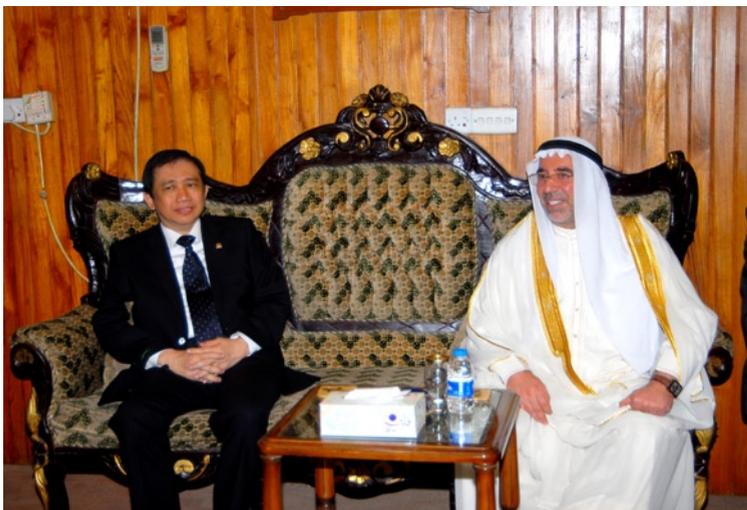
oleh anggota parlemen Irak.

Nota tersebut berisi antara lain, pertama, kedua belah pihak menekankan atas keinginan bersama membangun hubungan bilateral dan menyesuaikan sikap terhadap masalah-masalah dunia melalui komunikasi tingkat pejabat tinggi, konsultasi, meningkatkan reaksi dan dukungan bersama pada isu-isu penting Internasional dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan dan konsultasi diantara kedua belah pihak dalam kegiatan-kegiatan Internasional, Konperensi dan lain sebagainya.

Kedua yaitu, kedua Belah pihak bersepakat untuk berpartisipasi dalam membangun upaya-upaya bersama diantara kedua parlemen dalam bidang-bidang sebagai berikut : Kerjasama Pertukaran Pengalaman Di Berbagai Sektor Dan Tingkatan Di Bidang Legislatif, Hukum Dan Administratif Serta Kerjasama Antara Komite Dalam Kedua Parlemen Di Seluruh Bidang.

Kemudian berusaha, meningkatkan Hubungan Antara Komite Persahabatan Parlemen Dan Membangun Kerjasama Yang Erat Antara Kedua Parlemen Termasuk Pertukaran Kunjungan. selain itu, adanya kerjasama pertukaran keahlian dalam hal mekanisme kerja mengenai peran pengawasan parlemen dan penyusunan Anggaran Belanja Umum Dan Khusus serta mekanisme pengawasan atas pelaksanaannya dan memperkuat kemampuan kedua Parlemen di Bidang tersebut melalui pelaksanaan pelatihan dan lokakarya. (si)foto:si

\*\*



Ketua DPR Marzuki Alie mengadakan pertemuan dengan Menteri Perminyakan Republik Irak HE Abdul Kareen Luabi, di Baghdad, Irak.

# Hak Jawab Atas Siaran Pers Seknas Fitra Yang Disampaikan Ke Beberapa Media Dan Dimuat Pada Hari Kamis, 12 Mei 2011 Dengan Judul "Uang Isi Pulsa Anggota DPR"

Sehubungan dengan siaran pers Seknas FITRA yang disampaikan pada beberapa media (Republika, Rakyat Merdeka, Media Indonesia, Pelita, detik.com) dan dimuat pada hari Kamis, 12 Mei 2011 dengan judul siaran persnya "Uang Isi Pulsa Anggota DPR". Dimana dalam isi persnya memuat pernyataan dari Seknas FITRA, yaitu:



SEKRETARIS JENDERAL, Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.

1) Anggaran Penyerapan aspirasi atau reses untuk setiap anggota DPR pada tahun 2010 sebesar Rp.411 juta pertahun. Sedangkan pada tahun 2011, anggaran reses untuk setiap anggota DPR sebesar Rp. 442 juta pertahun. Rincian anggaran reses ini adalah, anggaran untuk satu orang DPR untuk bertemu konstituen pada tahun 2010 sebesar Rp. 309 juta pertahun untuk 5 kali reses, dan anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa HP pribadi anggaran DPR sebesar Rp. 102 juta pertahun untuk 5 kali reses. Sedangkan anggaran untuk satu orang DPR untuk bertemu konstituen pada tahun 2011 sebesar Rp. 340 juta pertahun untuk 5 kali reses, dan anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa HP pribadi anggaran DPR sebesar Rp. 102 juta pertahun untuk 5 kali reses.

2) Anggaran komunikasi atau isi pulsa HP Pribadi anggota DPR ini memang terlalu berlebihan atau bisa juga disebut bahwa DPR dengan begitu sadar melakukan double anggaran terhadap anggaran isi pulsa pribadi yang diambil dari Anggaran negara. Dimana, anggaran isi pulsa pribadi anggota DPR, selain mendapat dari alokasi anggaran reses sebesar Rp. 20 juta untuk satu kali reses, anggota DPR juga mendapat uang isi pulsa untuk setiap bulan sebesar Rp. 14 juta untuk satu orang anggota DPR, dan untuk setiap tahun, alokasi isi pulsa anggota DPR sebesar Rp.168 juta.

3) Dengan demikian, Total uang isi pulsa setiap anggota DPR sebesar Rp.270 juta pertahun. Atau pajak rakyat harus menyediakan total alokasi anggaran isi pulsa anggota DPR sebesar Rp. 151 milyar pertahun hanya untuk membayar pulsa sebanyak 560 anggota DPR. Uang pulsa ini sangat mubajir, sangat berlebihan, dan kelihatan uang pulsa ini masuk pada kantong pribadi anggota dewan untuk melampirkan hasrat hedonisme mereka saja. Dimana, Kalau untuk setiap bulan, anggota DPR menghabiskan rata-rata anggaran isi pulsa sebesar Rp. 22 juta perbulan untuk satu orang anggota DPR. Alokasi anggaran ini memang tidak adil karena, untuk saat ini saja, masyarakat miskin sangat kesulitan untuk memperoleh uang nafkah sehari-hari mereka sebesar Rp. 10.000 hanya kebutuhan uang makan mereka saja.

4) Anggaran penyerapan aspirasi atau reses, dan termasuk uang isi pulsa HP anggota dewan selama ini tidak memiliki akuntabilitas yang jelas, karena anggota DPR mendapatkan gelondongan anggaran reses tanpa mempertanggungjawabkan aspirasi apa yang diperoleh selama reses.

Isi siaran pers pada angka 1) s.d. 4) yang berkaitan Uang Pulsa tersebut sesungguhnya tidak pernah ada dalam DIPA DPR RI, sehingga isi siaran pers tersebut tidak berdasar, sangat tidak etis, terlalu berlebihan, tendensius dan sudah melampaui batas-batas kepatutan. Isi siaran pers yang memuat pernyataan Seknas FITRA dimaksud merupakan pendapat yang dapat menyesatkan opini publik, tidak hanya melanggar kode etik pers, melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sifatnya universal (dalam hal ini Anggota DPR) sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) juncto Pasal 28J UUD 1945, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Isi siaran pers yang dimuat di beberapa media (Republika, Rakyat Merdeka, Media Indonesia, Pelita, detik.com) dimaksud berdampak pada citra negatif terhadap, baik pada Anggota DPR maupun lembaga DPR.

Terhadap isi siaran pers tersebut perlu kiranya kami sampaikan bahwa terhadap apa yang disampaikan oleh Seknas FITRA adalah tidak benar dan tidak beralasan karena merupakan pendapat yang dapat menyesatkan opini publik.

Kami sangat menghargai suatu kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, tentunya sepanjang hal tersebut disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan data, etis, tanpa mengeliminir hak asasi manusia orang lain, juga perlu memperhatikan asas kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jika dihubungkan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Seknas FITRA, tidak benar dan dapat menyesatkan opini publik.

Perlu dipahami bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, ketertiban umum dalam suatu tata kehidupan masyarakat demokratis. Oleh karena itu, apabila ada seseorang atau kelompok yang telah melakukan suatu perbuatan merendahkan harkat dan martabat dasar orang lain baik langsung maupun tidak langsung dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian hak jawab ini untuk dimuat pada halaman yang sama di harian Republika, harian Rakyat Merdeka, harian Media Indonesia, harian Pelita, dan detik.com.

Selanjutnya, kepada Seknas FITRA yang menyampaikan pernyataan mengenai Uang Isi Pulsa Anggota DPR yang tidak berdasar wajib:

- 1) Mencabut/menarik pernyataan mengenai Uang Isi Pulsa Anggota DPR;
- 2) Menyampaikan permohonan maaf di semua media nasional;

Apabila dalam kurun waktu tiga hari terhitung sejak Hak Jawab ini dimuat dalam media nasional atau hak jawab ini tidak diindahkan, maka kami akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, terima kasih.

**SEKRETARIS JENDERAL,**

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.  
NIP. 195504131981032001

# Pembahasan Anggaran Harus Memahami Dasar Perhitungan Yang Tepat

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, dalam pembahasan anggaran dengan Pemerintah, hendaknya para Anggota Dewan memahami betul dasar pengalokasian yang tepat sehingga anggaran dalam APBN dapat terukur, terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan, yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Demikian disampaikan Marzuki saat Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, Senin (9/5) di gedung DPR.

Marzuki mengatakan, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selain monitoring terhadap pelaksanaan APBN tahun anggaran 2011 oleh Komisi-Komisi DPR-RI, untuk memenuhi Pasal 157 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, Dewan menjadwalkan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012.

Direncanakan 20 Mei mendatang akan dilakukan Rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN oleh Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012, Kebijakan Umum, dan Prioritas Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

Menurut Marzuki, Pandangan fraksi-fraksi atas keterangan Pemerintah diagendakan pada Rapat Paripurna berikutnya. Hasil Pembicaraan Pendahuluan ini akan dijadikan masukan oleh pemerintah bagi penyusunan RUU APBN tahun 2012 dan nota keuangannya setelah melalui persetujuan Rapat Paripurna DPR.

Lebih jauh Marzuki menyampaikan, penggunaan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN, dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi sangat diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Dewan berharap, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, akan menyebabkan bergeraknya sektor ekonomi, sehingga akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, kata Marzuki, pengangguran akan dapat diatasi, sehingga secara otomatis angka kemiskinan dapat dikurangi.

Asumsi-asumsi dasar dalam ekonomi makro, seperti PDB (Produk Domestik Bruto), tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar

Asia Tenggara,” katanya.

Jika dikaitkan dengan asumsi makro dalam penyusunan APBN tahun 2011, patokan nilai tukar Rupiah sebesar Rp. 9.250 perlu dilakukan adjustment terhadap angka APBN tahun 2011.

Dia juga mengingatkan, terapresiasinya nilai tukar Rupiah akan ber-



Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011

Rupiah terhadap Dolar, tingkat suku bunga, harga minyak, dan produksi/lifting minyak mentah, semua ini akan menentukan besaran APBN, yang akan mulai dibahas oleh Komisi-Komisi dan Badan Anggaran DPR-RI.

Marzuki menegaskan, Dewan akan terus memantau perkembangan nilai tukar Rupiah. Berdasarkan informasi Bank Indonesia, apresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 3,16% (Rp. 8.675 per US\$), bahkan diprediksi akan terus menguat bisa menembus angka Rp. 8.500. “Ini yang terkuat dalam tujuh tahun terakhir, dan merupakan peningkatan yang tertinggi di kawasan

dampak langsung pada arus perdagangan Indonesia. Dalam hal ini Dewan menekankan, agar otoritas moneter dan pengelola kebijakan fiskal harus memantau terus pergerakan nilai tukar rupiah. Penguatan ini merupakan respon positif bagi APBN kita.

Namun demikian, Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus menjaga nilai tukar rupiah agar tidak menguat terlalu cepat, karena penguatan yang terlalu cepat, berpotensi menekan ekspor Indonesia dan berdampak negatif terhadap fundamental ekonomi makro. (tt)foto: tt

\*\*\*

## Marzuki Alie

# Pancasila dan NKRI merupakan Dasar dan Bentuk Negara yang sudah Final

Bentrokan yang telah terjadi antara sekelompok masyarakat petani di Kebumen Selatan, Jawa Tengah dan TNI baru-baru ini, menjadi perhatian berbagai pihak diantaranya adalah DPR RI, khususnya Komisi I.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan keterangan kepada wartawan sesuai memimpin Sidang Rapat Paripurna IV tahun sidang 2010-2011

Dalam pidatonya saat memimpin rapat paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV tahun sidang 2010-2011, Ketua DPR RI Marzuki Alie pada Senin (9/5) menyatakan, Komisi I memahami penjelasan yang disampaikan secara terbuka oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI berkaitan dengan status tanah latihan TNI yang berdampak pada terjadinya insiden bentrokan.

Komisi I, lanjutnya akan melakukan pembahasan pada masa sidang tersebut, untuk menemukan solusi konkret atas permasalahan status tanah negara yang digunakan sebagai wilayah latihan TNI dan tanah negara yang dikelola TNI. "Dalam kasus ini, perlu ditegaskan penerapan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian masalah sengketa tanah. TNI harus meningkatkan upaya kehumasannya

untuk menghadirkan pemberitaan berdasarkan fakta dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada," terangnya.

Politisi Demokrat ini juga menyatakan Dewan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian RI menumpas gembong teroris yang sempat membuat masyarakat Indonesia resah dan khawatir. Kendati demikian, rasa aman yang dirasakan masyarakat, tidak berlangsung lama. Beberapa pekan yang lalu, kembali masyarakat Indonesia dibuat cemas dengan ulah para teroris, dimulai dari teror bom buku, aksi bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro Cirebon, dan terakhir rencana pengeboman di Gereja Christ Cathedral, Gading Serpong, Tangerang.

Marzuki juga menambahkan masyarakat sekarang ini, juga semakin dikhawatirkan dengan gencarnya upaya kelompok yang menamakan dirinya

Negara Islam Indonesia (NII), yang pada prakteknya ingin mengganti NKRI menjadi Negara Islam. "Kita tentunya sangat prihatin, bahwa Agama Islam yang rahmatan lil 'alamin, dijadikan alat untuk melakukan separatisme, terutama dengan mempengaruhi atau mengindoktrinasi generasi muda kita dengan paham Islam yang diselewengkan demi tujuan pribadi atau golongan NII itu sendiri," katanya.

Indoktrinasi dilakukan NII dinilai dengan cara-cara merusak moral dan mental generasi muda bangsa. Terhadap hal tersebut, Marzuki menegaskan, seluruh Bangsa Indonesia harus yakin bahwa Pancasila dan NKRI merupakan dasar dan bentuk negara yang sudah final, merupakan hasil kesepakatan para founding fathers beserta seluruh perwakilan rakyat Indonesia ketika negeri ini didirikan. Oleh karena itu, segenap bangsa Indonesia harus

mempertahkannya.

Marzuki pun mengatakan, beberapa anggota Dewan berpendapat, keberadaan NII merupakan organisasi sesat. Selain bertentangan dengan Pancasila, juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai/kaidah Islam. “Pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran agar kelompok ini tidak berkembang liar menjadi bahaya laten bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemerintah harus melakukan tindakan tegas dengan membubarkan dan membasmi kelompok NII terse-

but,” tegasnya.

“Kami khawatir NII telah masuk hampir di semua lini, seperti kampus, birokrasi dan menyusup ke partai-partai politik. Karena itu, gerakan NII harus segera ditindak tegas,” imbuh Marzuki.

Selain itu, Marzuki juga menegaskan, pemberantasan terorisme dan kelompok NII harus dilakukan oleh TNI, Kepolisian, aparat intelijen secara komprehensif dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan tercipta rasa aman dalam

kehidupan bermasyarakat, dan potensi yang dapat mengancam keutuhan NKRI dapat dikikis.

Ia juga menghimbau agar orangtua, pendidik, tokoh masyarakat dan pemuka agama, untuk senantiasa memberikan pemahaman yang tepat dan baik tentang Islam dan dalam hubungannya dengan Pancasila dalam kerangka NKRI. Sehingga anak-anak, generasi muda tidak akan mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin sesat yang dapat mengancam keutuhan NKRI. (Iss)foto:doc parle

## Komisi I DPR RI Kunjungi Amerika Serikat Bahas Kerjasama Pertahanan

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Amerika Serikat, dalam rangka membahas kerjasama bidang pertahanan.

**N**egara Amerika Serikat, dalam rangka membahas kerjasama bidang pertahanan.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasmita (F-PG), tim akan terbang ke Amerika Serikat melalui bandara Soekarno Hatta pada tanggal 6 Mei 2011 dan dijadwalkan tiba kembali di Jakarta 12 Mei 2011.

Pada era demokratisasi dunia dewasa ini, peran diplomasi internasional tidak lagi hanya menjadi domain dari Pemerintah, namun Parlemen sebagai kekuatan legislasi Negara juga mendapatkan peran dalam diplomasi internasional yang secara khusus disebut sebagai “Parliamentary Diplomacy”.

Ditinjau dari sisi de facto maupun de jure, Parlemen adalah representasi dari rakyat disuatu Negara, hal ini menjadikan peran Parlemen dalam menjalankan diplomasi antar negara tidak dapat diabaikan karena dapat dianggap sebagai manifestasi hubungan antar bangsa kedua Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Lembaga Representasi Rakyat, selain mempunyai fungsi dan tugas di bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran, juga mempunyai peran untuk mendukung



Komisi I DPR RI rapat membahas kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat

diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, serta meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di dunia berdasarkan prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. “Melalui Parliamentary Diplomacy, DPR RI ikut memperjuangkan tata kehidupan internasional berdasarkan prinsip perda maian, demokrasi, mengedepankan HAM dan kerja sama yang saling menguntungkan”, tegas Agus

Gumiwang.

Komisi I DPR RI sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI mempunyai fungsi dan tugas yang terkait dengan Bidang Luar Negeri, Pertahanan, Komunikasi dan Informatika, serta Intelijen. Berkaitan dengan arah kebijakan Komisi I DPR RI di bidang luar negeri, Komisi I DPR RI mempunyai kewajiban untuk membina hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di dunia, khususnya kerja sama antar parlemen, baik pada tingkat bilateral maupun multilateral dengan misi utama yang

diemban adalah untuk memajukan Ke-pentingan Nasional Indonesia dalam kancah pergaulan antar bangsa di dunia, serta berpartisipasi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan melaksanakan prinsip politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, berkaitan dengan Ruang Lingkup Komisi I DPR RI di bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI, modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan.

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Amerika Serikat akan menjadi peran diplomasi parlemen untuk menjajaki berbagai kemungkinan kerja sama teknis militer dan berbagai kerja-sama terkait dengan upaya peningkatan

pendidikan dan profesionalisme prajurit TNI.

Lebih lanjut, kunjungan Komisi I DPR RI tersebut adalah untuk menciptakan diversifikasi kerjasama militer RI dengan negara-negara mitra, sekaligus untuk melihat dan memperoleh gambaran dari dekat tentang bagaimana pemanfaatan dan pemberdayaan industri-industri strategis untuk pertahanan dapat dilaksanakan di negara-negara tersebut, untuk menjadi masukan bagi industri strategis/pertahanan nasional, serta mendorong kerja sama antara industri strategis/pertahanan nasional.

Untuk itu pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2011, Komisi I akan mengadakan Kunjungan United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pertemuan dengan Departement of Justice, Departement of Defense-Acquisition Technology and Logistics, defense intelligence, Deputy Assistant Secretary for East Asian and Pasific Affairs Mr. Joseph Yun, Deputy Assistant Secretary for Nuclear and Strategic Policy Marcy Ries, Federal

Communication (FCC), Director National Intelligence, Senate Foreign Relations Committee Dr. Jonah Blank, House Democracy Partnership-Rep. David Price (D-NC) dan (HDP).

Selain itu, Delegasi Komisi I juga akan mengadakan pertemuan dengan Industri Pertahanan, yang akan diatur oleh Cohen Group menghadirkan Boeing (Stanley Roth), Northrop Grumman (Bill Ennis and Jhon Brooks), Lockheed Martin (Chuck Jones and Rick Lirkland), Honeywell (Eric Wagner), Sikorsky dan Pratt & Whitney.

Pada bidang pengawasan, Komisi I DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program pemerintah serta mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. (parle) foto: doc parole

## Nilai Pemberitaan Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR RI tidak Berimbang

# “Nudirman Munir Paparkan 7 Antri di Gedung Nusantara I”

Anggota Komisi III Nudirman Munir menilai pemberitaan seputar rencana pembangunan gedung baru DPR tidak berimbang. Media menurutnya tidak memberikan ruang yang cukup terhadap kendala yang dihadapi anggota DPR saat berada di ruang kerja Gedung Nusantara I yang dinilainya sudah tidak mendukung kinerja karena selalu diwarnai 7 antri.

“Masalah gedung hari ini sudah begitu rupa, di ruangan saya kita sudah terbiasa 7 antri, antri duduk, antri ke WC, antri ke lift, antri makan karena kurang meja, antri kerja, antri menerima tamu, antri mengarsip, yang belum kita lakukan sekarang ini adalah antri ke rumah sakit apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut,” kata Nudirman dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR, Senin (9/5/11).

Ruangan yang ditempati saat ini

berkisar 6 x 5 meter atau tepatnya 32 meter persegi. Itu pun harus berbagi dengan 1 orang sekretaris dan 1 orang tenaga ahli. Ia menggambarkan sebagai anggota DPR tidak jarang ia menerima tamu yang datang dalam satu rombongan, bisa mahasiswa atau utusan masyarakat dari daerah pemilihan. “Beberapa tamu tertentu terkadang sulit untuk dilarang merokok, sehingga ruangan sempit yang dipenuhi arsip dan berkas itupun semakin tidak sehat,” tandas Nudirman.

Mantan aktivis mahasiswa yang pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini menambahkan, ia bersama stafnya termasuk telaten dalam mengelola arsip setiap persidangan dengan mitra kerja. Semua disimpan bersama berkas pendukung lain karena ia meyakini pada saat tertentu bisa saja diperlukan.

“Kalau ada yang mengatakan ruangan kerja ini tidak sempit, saya ingin lihat, ingin datang, apa yang

diarsip. Bisa jadi surat dan berkas begitu datang langsung masuk tempat sampah, tidak diarsip. Saya yakin kalau itu diarsip pasti ruangan kita sudah penuh,” kata politisi dari Fraksi Partai Golkar ini seraya mengundang para wartawan untuk melihat sendiri ke ruangnya.

Baginya rencana pembangunan ruangan baru atau gedung baru untuk anggota DPR, tenaga ahli dan staf pendukung lain sangat diperlukan untuk mendukung kinerja yang lebih profesional. Ia juga meminta segenap pihak menjaga kepercayaan publik dengan membuka seluruh proses pembangunan secara transparan. “DPR perlu mengundang KPK dan BPK untuk mengawasi jalannya pelaksanaan proyek. Apabila seluruh tahapan sudah dilakukan dengan benar, maka pembangunan jangan ditunda-tunda lagi,” demikian Nudirman.

Anggota komisi VII dari FPAN Totok Daryanto menilai paparan Nudirman Munir terhadap kondisi Gedung Nusantara I dapat diterima karena faktanya ia juga menghadapi situasi yang sama. “Kalau saja penjelasan dari saudara kita Nudirman Munir yang tadi disampaikan dengan jelas dan sistematis, kalo itu yang di-blow up dan dipahami



oleh rakyat, saya kira pandangan terhadap DPR akan berbeda,” imbuhnya.

Wakil rakyat dari dapil DIY ini menambahkan selama ini FPAN cenderung menolak rencana pembangunan gedung baru karena memperhatikan aspirasi rakyat memang menyuarakan itu. Ia mengusulkan perlunya dibangun ruang dialog yang lebih efektif dengan publik, agar pemahaman terhadap tantangan kerja yang dihadapi anggota DPR kedepan dapat dipahami sama seperti yang dirasakan wakilnya di parlemen.

Ketua DPR RI Marzuki Ali yang memimpin jalannya Rapat Paripurna menyambut baik penjelasan yang disampaikan. “Saudara kita Nudirman Munir telah menyampaikan apa adanya dan ini patut mendapat apresiasi. Jadi harus jujur menyampaikan kondisi ruangan teman-teman, jangan liat ruangan Ketua DPR yang bisa menampung 100 orang. Saya juga memikirkan ruangan teman-teman yang sudah sangat sempit, supaya bisa fokus bekerja dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” ujarnya. (iky)foto:iky

## Pimpinan DPR Lakukan Kunlap Ke Aceh

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Polkam, H. Priyo Budi Santoso akan memimpin kunjungan lapangan ke Propinsi Aceh, dari tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2011. Kunjungan tersebut dalam rangka pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Tim kunjungan lapangan akan diikuti 17 (tujuh belas) orang anggota. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mencari masukan dari kalangan masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006.

Pada hari pertama rombongan akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Univ. Syiah Kuala, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Mantan Ketua Dewan Pengawas BRR, Bupati /Walikota se Aceh, Kepala BPKS Sabang, Ketua Bappeda Prov Aceh, Pimpinan Tim Likuidasi BRR/Kakan-

wil Keuangan Prov Aceh, Kepala Perwakilan BPK Aceh, Ka Dinas Bina Marga, Pengairan, Perhubungan, General Manager PLN.

Selain itu, rombongan juga akan mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Redaksi Harian Serambi, Pemred Harian Aceh, Pemred Harian Waspada Perwakilan Aceh, Kepala Biro Kantor Berita Antara Prov Aceh, Pemred Harian Analisa Banda Aceh, Pemred TVRI Perwakilan Aceh, Pemred Metro TV Perwakilan Aceh, Pemred RCTI Perwakilan Aceh, Pemred TV One Perwakilan Aceh dan Ketua Koordinator LSM Aceh.

Di hari kedua, rombongan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, Tim pertama dipimpin Wakil Ketua DPR-RI H. Priyo Budi Santoso disertai tujuh orang anggota yakni, Marzuki Daud yang juga sebagai Wakil Ketua Tim/FPG, Manuel Kaisiepo, Wakil Ketua Tim/FPDI Perjuangan, Muslim, F-PD, Rahadi Zakaria F-PDI Perjuangan, H. Raihan Iskandar F-PKS, Tgk. H. Mohd Faisal Amin F-PPP, Soepriyatno F-Gerindra.

Tim ini akan melakukan kunjungan ke berbagai daerah, diantaranya Kab. Pidie, Kab. Bireun. Kab. Bener meriah. Kab. Aceh Tengah. Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur. Diantara seluruh



kegiatan yang dilakukan, Tim ini akan meninjau pembangunan PAM.

Sementara Ketua Tim II dipimpin H. Muhammad Nasir Djamil, F-PKS yang diikuti 8 orang anggota, yaitu Nova Iriansyah F-PD, Yorris Raweyai F-PG, Khatibul Umam Wiranu F-PD, HM. Ali Yacob F-PD, H. Sayed Fuad Zakaria, F-PG, Achmad Basarah F-PDI Perjuangan, H. Azwar Abubakar F-PAN, dan Ida Fauziah F-PKB.

Tim ke dua akan melakukan kunjungan lapangan ke Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya dan Ke Kota Banda Aceh. Tim ini akan meninjau perumahan BRR yang sampai saat ini belum selesai dan dilanjutkan peninjauan ke pembangunan jalan dan jembatan Banda Aceh-Meulaboh Kab. Nagan Raya. (Spy).foto:spy/doc parle

## Pansus BPJS Pertanyakan DIM Baru Usulan Pemerintah

Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DPR RI mempertanyakan Daftar Inventaris Masalah (DIM) baru usulan Pemerintah yang diajukan kepada DPR dalam Rapat Kerja Pansus BPJS dengan tujuh menteri di Gedung DPR, Kamis (12/5).



Anggota Pansus BPJS dari F-PDIP Rieke Dyah Pitaloka

Anggota Pansus BPJS dari F-PDIP Rieke Dyah Pitaloka, mengatakan DIM baru RUU BPJS yang diusulkan kembali ke DPR banyak mengandung jebakan Batman.

Rieke mempertanyakan definisi pemerintah terhadap pengertian BPJS. "Apakah pemerintah mengang-

gap BPJS sama dengan bantuan sosial atau sama dengan jaminan sosial?" kata Rieke.

Dalam DIM baru yang diusulkan pemerintah, tidak terdapat definisi BPJS. "Jadi, menurut pemerintah, BPJS seperti apa," katanya.

Anggota Pansus BPJS dari F-PG Endang Agustini Syarwan Hamid, mempertanyakan apakah dengan modal awal Rp 2 triliun bagi BPJS yang diusulkan pemerintah, tidak lagi diperlukan iuran. Ia juga mempertanyakan definisi BPJS sebagai jaminan sosial atau sebuah asuransi kesehatan. "Kalau Jamkesmas itu bantuan sosial," ujarnya.

Setelah sempat buntu, rapat kerja Pansus RUU BPJS hari ini adalah untuk pertama kalinya RUU BPJS kembali dibahas antara pemerintah dan DPR, dengan sisa waktu 44 hari untuk menuntaskan RUU BPJS dalam Masa Persidangan ini. Kali ini, pemerintah

mengajukan DIM baru, hampir dua pertiga dari DIM yang lama dirombak.

Dalam DIM barunya, Pemerintah mengusulkan pembentukan BPJS dengan modal awal sebesar Rp 2 triliun. BPJS yang nanti dibentuk adalah sebuah lembaga baru dan bukan hasil konversi lembaga jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya.

Saat ini, sudah ada empat lembaga yang menjalankan layanan jaminan sosial, yaitu Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri.

Dari delapan menteri yang mewakili pemerintah, hanya tujuh menteri yang hadir, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri PAN EE Mangindaan, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Sementara itu, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih tidak hadir dan diwakili salah satu dirjenjennya. (sc) foto:hr

# Ketua DPR Terima Kunjungan Dubes Ekuador

Ketua DPR, Marzuki Alie berharap, Parlemen Indonesia dapat membuat sebuah Grup Kerjasama Bilateral dengan Ekuador untuk mempererat hubungan antar kedua negara. Hal tersebut disampaikan saat Marzuki menerima kunjungan Dubes Ekuador, Eduardo Calderon di Ruang Tamu Pimpinan, Kamis (12/5).

dengan Indonesia, dan membicarakan-nya secara khusus dengan Parlemen Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Marzuki mengatakan hal senada, ia pun menginginkan agar hubungan antara Indonesia dengan Ekuador tidak saja terbatas pada satu bidang saja, tetapi dapat dikembangkan di berbagai bidang.

“Kami yakin dalam kunjungan ini tentunya akan membawa manfaat

yang terlalu jauh dari Indonesia, namun Marzuki yakin dengan komunikasi yang lebih baik antar parlemen dan antar pemerintahan, potensi-potensi yang dimiliki oleh Negara Indonesia dapat terinformasikan dengan baik.

Dalam kunjungan tersebut, Dubes Ekuador juga memberikan Undanguan secara resmi kepada Ketua DPR agar dapat mengunjungi negaranya dan membahas lebih lanjut mengenai po-



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima kunjungan Dubes Ekuador, Eduardo Calderon di Ruang Tamu Pimpinan

“ Kami mengharapkan hubungan antara kedua negara yang selama ini sudah terjalin dalam bidang energi yang telah diwakili oleh PT. Pertamina dapat terjalin semakin erat dan bertambah tidak saja di sektor energi tetapi di sektor-sektor lainnya,” terang Marzuki.

Eduardo mengatakan, ia sangat menginginkan dapat menggali potensi yang ada di Indonesia dan dapat membangun kerjasama di berbagai bidang

bagi kedua negara dan akan meningkatkan hubungan yang lain tidak saja hubungan politik, ekonomi tapi bahkan sosial dan budaya, perdagangan Indonesia memang masih surplus dengan ekuador tetapi masih relatif rendah dan tentu dapat kita tingkatkan lagi,” terangnya.

Marzuki menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi yang besar, dan mungkin ini yang tidak terinformasikan dikarenakan jarak wilayah

tensi apa saja yang dapat dibangun antar kedua negara.

“Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang secara resmi yang telah diberikan secara resmi kepada kami, dan kami akan menyiapkan waktu yang terbaik untuk dapat berkunjung ke Ekuador dan tentunya maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk mempererat hubungan antara kedua negara khususnya diantara kedua parlemen,” pungkasnya. (ra)foto:parle

# DPR Minta Konflik Kamboja dan Thailand Diselesaikan dengan Damai

Konflik perbatasan antara Kamboja - Thailand menjadi perhatian DPR RI dalam pertemuan delegasi parlemen negara Asean yang tergabung dalam AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) dengan Kepala Negara dan Pemerintahan pada pelaksanaan KTT Asean ke 18 di Balai Sidang Jakarta, Sabtu (7/5/2011).

**K**etua DPR RI Marzuki Ali yang memimpin delegasi parlemen Indonesia pada kesempatan itu menyuarakan agar sengketa perbatasan kedua negara diselesaikan dengan cara-cara damai.

“Kita minta diselesaikan secara damai, tentu ada koridornya apa itu UN

hususnya dikawasan ini dalam rangka membawa Asean seperti yang kita cita-citakan,” kata Marzuki kepada wartawan usai mengikuti sidang.

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja bagi Ketua DPR sudah memasuki situasi serius karena telah menewaskan prajurit kedua belah pihak dalam kontak tembak yang terjadi di wilayah

ngiriman peninjau dari TNI ke kawasan sengketa.

Usai sidang tambah Marzuki, delegasi DPR RI juga membicarakan masalah ini dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional (Parlemen) Kamboja Heng Samrin. “Kita mencatat Kamboja juga menginginkan penyelesaian damai, dan mengharapkan pasukan TNI berperan dalam penyelesaian konflik ini,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah delegasi parlemen Indonesia juga melanjutkan pertemuan bilateral dengan Thailand, menurutnya belum dapat dilakukan. Namun ia tidak menjelaskan alasannya lebih jauh.

Pada bagian lain Ketua DPR RI menjelaskan langkah Asean melibatkan AIPA dalam pelaksanaan KTT merupakan sinergitas kedua, setelah pertemuan pertama di Hanoi, Vietnam. Baginya keterlibatan parlemen dalam pencapaian Komunitas Asean 2015 sangat penting.

“Dalam Asean Community 2015 kalau kita bicara pendidikan semua masyarakat Asean harusnya sudah mendapat pendidikan, kalau bicara kesejahteraan artinya semua penduduk Asean sudah tersejahterakan, ini efektif kalau ada sinergi parlemen dan pemerintah,” ujarnya. (iky)foto:iky



pertemuan bilateral Ketua DPR RI Marzuki Ali dengan Ketua Majelis Nasional (Parlemen) Kamboja Heng Samrin.

Charter, Asean Charter atau kaidah-kaidah internasional lainnya. Bahwa konflik itu tidak akan membawa kesejahteraan, stabilitas sangat penting

sengketa dekat kuil Hindu Preah Vihear. Salah satu langkah kongkrit yang didukung AIPA dan telah diputuskan dalam KTT adalah mendukung pe-

raan artinya semua penduduk Asean sudah tersejahterakan, ini efektif kalau ada sinergi parlemen dan pemerintah,” ujarnya. (iky)foto:iky

# Ujian Nasional, Pelaksanaan, Dan Evaluasinya

Para founding fathers telah mengamanatkan melalui UUD 1945 alinea ke-4 untuk: mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu mekanisme untuk mencerdaskan anak bangsa adalah melalui pendidikan yang berjenjang.



Oleh: DR. H. Marzuki Alie

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dan membiayai pendidikan, dimulai dari sekolah dasar, menengah dan menengah atas, dilaksanakan dan harus dapat terukur peningkatannya dari tahun ke tahun. Untuk dapat mengukur peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, maka evaluasi secara menyeluruh terhadap pendidikan merupakan suatu keniscayaan bagi Pemerintah. Evaluasi ini diamanatkan melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1) dan (2).

Dalam mengimplementasikan perintah UU No. 20 tahun 2003, Pemerintah membuat PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP tersebut, pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa: penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh Pemerintah.

Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UN bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak pertama kali diberlakukan, setiap tahunnya pelaksanaan UN selalu diwarnai kontroversi. Beragam usaha diupayakan dalam rangka menyempurnakan formula UN. Hingga tahun ini, penyempurnaan tersebut berhasil mereduksi kontroversi dan membuat UN lebih diterima secara luas.

Pada bulan April yang lalu, UN telah berhasil terselenggara pada tanggal 18-20 April untuk SMA/MA dan SMK,

X DPR RI, yang dilandasi semangat perbaikan UN 2010/2011 untuk lebih menghargai proses belajar mengajar yang dilalui siswa. Formula baru tersebut menggunakan sistem penilaian terpadu, yaitu menggabungkan nilai UN dengan Nilai Sekolah (NS). Nilai Sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1-4. Gabungan nilai NS dengan nilai UN ditetapkan minimal 5,5 dimana masing-masing memiliki bobot tertentu, yaitu UN 60% dan NS 40%. Formula baru yang longgar dan dinilai menguntungkan siswa ini, menjadikan UN ulangan ditiadakan. Peniadaan tersebut juga menguntungkan Pemerintah



dan tanggal 25-28 April untuk SMP/MTs. Sayangnya, di tengah kerja keras yang dilakukan tersebut, praktek kecurangan selalu muncul, yang seakan-akan menjadi budaya dan menjadi tantangan tersendiri yang penting untuk disoroti.

## Formula Baru

Formula baru UN tahun ini dirumuskan melalui rapat kerja "Formulasi dan Pelaksanaan UN 2011" dengan Komisi

karena dapat mengifisiensi waktu dan anggaran. Sistem kelulusan UN 2011 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional.

## Bentuk Pengawasan

Pengawasan UN semakin diperketat mulai dari hulu hingga ke hilir. Pengawasan di hulu dilakukan di beberapa titik rawan. Berdasarkan identifikasi Mendiknas, terdapat tiga titik rawan

kebocoran soal yang membutuhkan pengawasan. Pertama, pengawasan di percetakan dilakukan dengan menjamin keamanan percetakan yang mengikuti tender percetakan soal UN berdasarkan beberapa kriteria, salah satunya memiliki security system yang baik. Kedua, pengawasan pada proses distribusi soal UN dari percetakan ke rayon. Ketiga, pengawasan di titik rayon dengan pendampingan beberapa anggota kepolisian.

Pengawasan di hilir dilakukan oleh pengawas pelaksanaan ujian. Pelaksanaan ujian nasional tahun 2011 tetap menggunakan sistem pengawas silang. Guru di suatu sekolah tidak diperkenankan mengawas di sekolahnya sendiri. Sistem silang murni ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan kecurangan yang melibatkan kerja sama siswa dengan guru.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih dilibatkan dalam penyelenggaraan UN. Peranan mereka antara lain, untuk menjamin objektifitas dan kredibilitas UN di wilayahnya. Komisi X DPR-RI turut aktif terlibat dalam pengawasan

UN tahun ini melalui kunjungan kerja secara spesifik ke daerah-daerah yang dilakukan selama masa reses. Komisi X DPR-RI juga membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan kejadian pelanggaran selama UN, dimana laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk UN tahun selanjutnya. Pada pengawasan tahun lalu, banyak kasus yang ditemui. Penyimpangan yang paling menonjol adalah kasus kebocoran soal.

### Evaluasi

Evaluasi UN dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan kepada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. Evaluasi hasil belajar oleh peserta didik, dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar

peserta didik secara berkesinambungan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Diharapkan sekolah dan pihak-pihak yang terkait lainnya sudah lebih dewasa dalam menyikapi Ujian Nasional sebagai bentuk achievement test sehingga mampu bekerja sama dalam menyelenggarakan ujian yang objektif, adil dan bersih. Adapun mengenai wacana menjadikan Ujian Nasional sebagai tiket masuk Perguruan Tinggi masih perlu dikaji lebih. Ujian masuk merupakan tes prediksi keberhasilan calon mahasiswa sedangkan Ujian Nasional mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dijalani.

Formula UN perlu terus dikembangkan untuk dapat meminimalisir penyimpangan. Kedepan, bukan lagi target kelulusan yang perlu dijadikan prioritas, melainkan nilai kejujuran dari pelaksanaan UN yang akan ikut menentukan keberhasilan upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.\*

## Komisi XI DPR Minta BPK Lakukan Audit Investigasi Pesawat

Komisi XI DPR-RI meminta audit investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus pembelian pesawat M-60 asal China.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis dari Fraksi Golkar ketika memimpin rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Kamis (12/5)

“Kemungkinannya kita minta

keputusan untuk meminta audit investigasi, khusus melakukan audit terkait masalah SLA (Subsidiary Loan Agreement) MA-60,” katanya saat memimpin RDP dengan Pemerintah dan Merpati yang dihadiri oleh Sekjen Kementerian Keuangan Mulia Nasution dan juga jajaran Direksi Merpati.

Harry mengatakan bahwa soal audit investigasi ini menjadi keputusan yang diminta Komisi XI DPR-RI. Alasannya pihaknya sudah berkali-kali meminta penjelasan lebih dalam dari pihak Pemerintah dan Merpati, namun jawaban yang memuaskan belum ada.

Rapat hari tersebut berakhir dengan penundaan untuk kedua kalinya, dimana pihak Komisi XI membuat kesimpulan sementara atas permasalahan tersebut dan melanjutkannya kembali pada 30 Mei 2011 nanti. (si) foto : iw



Pimpinan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR

# Priyo Minta Pemerintah Periksa Keterkaitan Ponpes Az Zaytun dengan NII

DPR RI tidak dalam posisi meminta menutup atau membuka Pondok Pesantren Az Zaytun di Indramayu, Jawa Barat karena sampai saat ini belum ada hasil pemeriksaan negara terhadap dugaan keterkaitan dengan organisasi NII (Negara Islam Indonesia).

Pernyataan ini disampaikan Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR saat bicara dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi dengan topik 'Menyoroti Maraknya Radikalisme' di ruang wartawan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/5/11).

"Pemerintah perlu meneliti, meneliti, memeriksa, menuntaskan apa NII terkait dengan pesantren Az Zaytun. Kalau ternyata tidak ada kaitan umumkan, clearkan. Apabila ada kaitan umumkan pula dan kemudian minta tindakan hukum untuk memberi kepastian dan rasa nyaman masyarakat luas," kata Priyo.

Sejauh ini peran yang dapat dikerjakan DPR menurutnya meminta aparat pro aktif melakukan pemeriksaan. Sementara proses itu berlangsung ia menghimbau segenap pihak tidak serta merta menarik kesimpulan Az Zaytun berarti NII. Fakta lapangan yang sejauh ini didapatnya adalah banyak alumni pesantren tersebut berkelakuan baik, tidak seperti kader NII yang menganggap umat muslim lain adalah kafir.

Politisi Partai Golkar ini membantah kalau partainya kecolongan karena ada kader memiliki latar belakang NII. Priyo menekankan sejak awal Golkar tegas pada platform sesuai ideologi negara, Pancasila. "Apabila ada yang menyusup dipastikan tidak akan bertahan lama dan akan mental dari par-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kedua dari kiri) saat berbicara dalam acara diskusi di ruang wartawan Gedung DPR

tai," tandasnya.

Sementara itu bicara dalam diskusi yang sama mantan menteri NII, Imam Supriyanto memaparkan Pondok Pesantren Az Zaytun berkaitan dengan keberadaan organisasi NII. Panji Gumilang sebagai pimpinan ponpes pasca reformasi memang ingin berkontribusi membangun sektor pendidikan. Namun pada tahun 2004 niat itu berubah, ia mulai membangun jaringan NII di partai politik dan beragam kelompok masyarakat lain seperti, mahasiswa, artis dan PNS.

"Kondisi sekarang ada kaitannya dengan kebangkitan Tentara Islam Indonesia yang dulu pernah didirikan oleh Kartosuwiryo," jelas Iman. Kader muda NII menurutnya telah aktif melakukan latihan militer dan mencari dukungan dana dari luar negeri. Upaya

menghimpun dana dari dalam negeri juga dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan mencuri, seperti yang pernah dilakukannya. Dana yang berhasil dihimpun diantaranya disimpan di Bank Century, Mandiri serta Kesawan.

Mantan menteri peningkatan produksi NII ini mengaku terpenggil untuk membeberkan keberadaan organisasi yang pernah dipimpinnya karena tersentuh dengan informasi banyaknya orang tua yang kehilangan anak. "Saya buka semua karena nurani saya terpenggil, banyak orang tua kehilangan anak karena direkrut NII," imbuhnya. Imam berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap tokoh sentral NII, Panji Gumilang untuk menghentikan pergerakan organisasi ini. (iky)



Jajaran Pimpinan DPR saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, di Ruang Paripurna Nusantara II. senin, 9 Mei 2011. foto: HR



Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan Song Young-sun dan Lee Jin-sam, Anggota Parlemen bidang Pertahanan Korea Selatan di Gedung Nusantara II. Kamis, 12 Mei 2011. foto: AS



Rapat Panja RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang dipimpin oleh Daryatmo Mardiyanto (foto kiri) antara lain dihadiri Panglima TNI Laksmamana Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo (foto kanan), berlangsung di ruang Pansus C. 11-12 Mei 2011. foto:HR



Rapat Gabungan Komisi VII dan Komisi XI di Ruang Rapat KK I mengenai masalah Newmont, dibuka oleh Wakil Ketua DPR Anis Matta dilanjutkan oleh Harry Azhar Azis sebagai pimpinan rapat. Kamis, 12 Mei 2011. foto: IW

